

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hadjon, Phillipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Rajawali Pers. Jakarta. 2015
- Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law, Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Hans Kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006 87
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Ruslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Aksara Baru. Jakarta. 1983
- Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008
- Saptosih Ismiati, S. M. (April 2020). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) (SEBUAH KAJIAN YURIDIS) (Vol. 1). Yogyakarta: Deepublish
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sudarto. Hukum dan Perkembangan Masyarakat. Sinar Baru. Bandung 1983

Suherman, E. Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961- 1995), Mandar Maju, Bandung: 2000 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

## **B. Jurnal**

Agung-RI, B. H. (t.thn.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI.

Albertus Saluna Krishartadi. (2015). , Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Perkara Pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari. Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 21.

Alydrus, S. M., Suhadi, & Lutfitasari, R. (2020, Maret). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PT. PLN (PERSERO) BALIKPAPAN TERKAIT ADANYA PEMADAMAN LISTRIK. Jurnal Lex Suprema, II(1), 362-377.

Astri, I. L., Sunaryo, S., & Jatmiko, B. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika. Ilrej, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, 32-49.

Butarbutar, E. N. (2012, Januari-April). ANTINOMI DALAM PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM. Yustisia, Vol. 1(No.1), 145-157.

Dairani. (2021). Argumentasi Hukum Dan Upaya Mempertahankan Eksistensi. Volume 1, No. 1, April 2021, 19-34.

Erwiningsih, W. (1995). PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA. *JURNAL HUKUM*, 1, 21-26.

Garwan, I., & Hidayat, A. (2018, September). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG. *Jurnal Justisi Hukum*, III(1), 120-139.

Grattia, M. (2023, Maret 1). Apa Itu Hak Asasi Manusia? Begini Macam-macam HAM dan Hak Dasar Manusia Baca artikel detikedu, "Apa Itu Hak Asasi Manusia? Begini Macam-macam HAM dan Hak Dasar Manusia" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6594566/apa-itu-hak-asasi-manusia>. Dipetik Juli 2023, dari detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6594566/apa-itu-hak-asasi-manusia-begini-macam-macam-ham-dan-hak-dasar-manusia>

Hariyani, I., & Serfiyani, C. Y. (2017, September). PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS JASA PM-TEKFIN. *Jurnal Leglisasi Indonesia*, 14(3), 333 - 346.

Hidayat, E. (n.d.). Perlindungan Hak Asasi Manusia. Dosen Fakultas Syariah Iain Raden Intan Lampung, 80-87.

Hidayat, R., Rabi, A., & Sonalitha, E. (2020). System Pendeteksi Pelanggar Traffic Light pada Zebra Cross Menggunakan Raspberry Pi Berbasis Pengolahan Citra Digital. *Jeecae* Vol.5, No.1, Mei 2020, 1-8.

Hukumonline, T. (2022, September 30). Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya. Dipetik Juli 2023, dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062?page=3>

<https://e-journal.uajy.ac.id/18207/3/HK116162.pdf>, diakses 28 Desember 2022

[https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2009\\_22.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf), diakses 27 Desember 2022

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>, diakses 20 Desember 2022

Indonesia, C. (2022, Juli 22). Polisi: Citayam Fashion Week di Jakarta Langgar UU Lalu Lintas. Dipetik Juli 2023, dari cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220722180647-12-825003/polisi-citayam-fashion-week-di-jakarta-langgar-uu-lalu-lintas>

Isnawan, F. (2023, Juni 18). Fenomena Citayam Fashion Week Dalam Tinjauan Hukum Islam. *ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 80-98.

Itsaini, F. M. (2021, April 28). Pelanggaran HAM: Pengertian, Jenis, dan Contoh Kasusnya. Dipetik Juli 2023, dari detik.com:

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5550068/pelanggaran-ham-pengertian-jenis-dan-contoh-kasusnya>

Justika, R. (2021, Oktober 12). Syarat Mendapatkan Perlindungan Hukum yang Harus Kamu Tahu. Dipetik Juli 2023, dari [blog.justika.com](http://blog.justika.com): <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/syarat-mendapatkan-perlindungan-hukum/>

Kurniawan, A. (2020, Oktober 16). 6 Macam-macam HAM beserta Contohnya, Berikut Pasal yang Menyertainya. Dipetik Juli 2023, dari [merdeka.com](http://merdeka.com): <https://www.merdeka.com/jabar/6-macam-macam-ham-beserta-contohnya-berikut-pasal-yang-menyertainya-klm.html>

Lubis, H. S. (2018). Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam. *UIB Respository* 2018, 64-70.

M, H. A., & Kaunang. (2019, November). TANGGUNGJAWAB HUKUM PEMERINTAH DALAM KETERSEDIAAN FASILITAS MASYARAKAT PEJALAN KAKI DAN PENYANDANG CACAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009. *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 11/Nov/2019, Vol. VII(No.11), hal. 80-87.

Mulyani, S. (2016, September 26). PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16(3), 337 - 351.

- Nola, L. F. (2016, Juni 17). UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI). *NEGARA HUKUM*, 7(1), 35-52.
- Nurfajriana, S., Rosuli, Z. C., & Mulyadi. (2023, Mei). Perlindungan Hukum Terhadap Pejalan Kaki Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Trotoar di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 490-497.
- Padiatra, A. M., & Sari, S. N. (2022, Desember). BERADU OUTFIT ALA SUBKULTUR IBUKOTA: CITAYAM FASHION WEEK DALAM TELAAH FENOMENOLOGI EDMUND HUSSERL. *Jurnal Yaqzhan*, 8(2), 253-261.
- Pratama, A., & Nurcahyono, A. (2019). Hak Pejalan Kaki dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikaitkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. *Prosiding Ilmu Hukum*, V(2), 1263-1267.
- Primasasti, A. (2022, Desember 1). Hak Pejalan Kaki Dalam Berlalu Lintas. Dipetik Juli 2023, dari surakarta.go.id: <https://surakarta.go.id/?p=27794#:~:text=Dalam%20pasal%20131%2C%20tertulis%20aturan,menyeberang%20jalan%20di%20tempat%20pe%20nyeberangan>
- Saitya, I. B. (2017, September 30). Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), 78-82.

Sapitri, W. O., Lubis, F. O., & Lubis, F. M. (2023). Studi Literatur Tanggapan Masyarakat terhadap Viralnya Fenomena Citayam zebra di Tiktok. *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(1), 84-89.

S, R. H., Rabi, A., & Sonalitha, E. (2020, Mei). System Pendeteksi Pelanggar Traffic Light pada Zebra Cross Menggunakan Raspberry Pi Berbasis Pengolahan Citra Digital. (1-7, Penyunt.) *JEECAE* , 5(1).

Winarno, A. W., & Isradjuningtias, A. C. (2022). Perlindungan Hukum Pelaku Usaha E-Commerce Terhadap Pelaku Pemalsuan Akun Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Volume 08, Nomor 01, Januari-Juni 2022*, 580-592

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999

Forum Kadilan, Rapor Penegakan Hukum, No.35/24 Desember 2012 - 06 Januari 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025  
Undang-

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia, Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Nomor: 131/KMA/SKB/ X/2012; MHH-07.HM.03.02 TAHUN 2012; Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor B/39/X/2012, Rabu, tanggal 17 Oktober 2012.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 16 tahun 1960 Tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHAP.

Perencanaan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2008.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;



Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan  
Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas;

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  
Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  
165. Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Dasar 1945